

Dinamika Komunikasi Politik antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Terkait Distribusi Sumber Daya (Studi Pada Kalurahan Salamrejo Kabupaten Kulon Progo)

Titis Rahayuningtiar¹, Sri Widayanti²

¹ Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

² Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Corresponding Author: brightfuturegrowth@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.710>

Article Info

Article History;

Received:

2025-07-03

Revised:

2025-08-05

Accepted:

2025-10-15

Abstrak: Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjalankan sistem pemerintahan dibawah kebijakan otonomi daerah. Paniradya Kaistimewan yang dipimpin oleh Paniradya Pati bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Penyusun Kebijakan Urusan Keistimewaan DIY. Paniradya Kaistimewan sebagai pelaku komunikasi politik bertugas memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pengambilan kebijakan urusan Keistimewaan DIY dilakukan dengan proses yang terstruktur. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pola komunikasi yang dilakukan di tingkat lokal khususnya yang berkaitan dengan distribusi sumber daya yang mana hal tersebut memengaruhi proses pembuatan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian menemukan bahwa komunikasi antara Pemerintah Kalurahan Salamrejo dan Pemerintah Daerah Daerah istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) sudah berjalan cukup baik. Akan tetapi hambatan justru muncul dari komunikasi di tingkat internal kalurahan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menjadi bahan masukan untuk memprioritaskan bahkan menyetarakan kapasitas aparatur Kalurahan khususnya di bidang administratif dan teknologi informasi.

Katakunci: Komunikasi Politik, Distribusi Sumber Daya, Dana Keistimewaan

PENDAHULUAN

Peran DIY di masa lalu sebagai salah satu elemen penting dalam proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadikan DIY memiliki kewenangan dibawah kebijakan otonomi daerah dengan mempertimbangkan beragam faktor seperti faktor ekonomi, sosial hingga budaya. Sehingga pada tahun 2012 terbentuk Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Status yang disandang DIY sebagai sebuah pemerintah daerah dibawah kebijakan otonomi daerah yang memiliki hak keistimewaan membawa DIY mendapatkan tambahan Dana Keistimewaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengelola sumber daya dan menjalankan fungsi daerah otonomi yang mendapatkan hak istimewa. Kewenangan istimewa tersebut meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemda DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Dengan demikian, Pemda DIY mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan istimewa

berdasarkan Undang-Undang ini dan kewenangan berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Namun, kewenangan yang telah dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota di DIY tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paniradya Kaistimewan adalah salah satu organisasi perangkat daerah di DIY yang memiliki tugas sebagai penyusun kebijakan dan penanggungjawab pelaksanaan urusan keistimewaan yang bersumber dari Dana Keistimewaan. Paniradya Kaistimewan dipimpin oleh seorang *Paniradya Pati* yang memiliki tanggungjawab menjalankan roda pelaksanaan keistimewaan berjalan dengan baik. Pola komunikasi yang terjadi di Paniradya Kaistimewan merupakan salah satu hal yang sangat berperan dalam proses pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal sehingga semua yang berkaitan dengan urusan keistimewaan perlu pemahaman mendalam yang berkaitan dengan dinamika politik lokal. Bawa komunikasi politik merupakan sebuah proses interaksi antara warga dengan negara (pemerintah) sebagai pelaku komunikasi pada suatu sistem politik (1).

Strategi komunikasi yang disengaja dari suatu organisasi atau institusi tersebut membutuhkan aktor dan tujuan (2). Aktor yang dimaksud adalah para pengambil keputusan yang berperan untuk menyusun kebijakan dan juga aktor-aktor lain yang akan melaksanakan program. Sedangkan tujuan yang dimaksud adalah capaian yang dapat diukur dan sesuai dengan target yang ingin diperoleh. Komunikasi politik merupakan penyampaian pesan yang diarahkan pencapaian dan pengaruh sehingga segala permasalahan oleh kegiatan komunikasi tersebut dapat meningkat semua unsur kelompok (3). Proses implementasi kebijakan dalam penelitian ini fokus kepada penyaluran Dana Keistimewaan kepada Kalurahan. Penyaluran dana tersebut tentu dengan nominal yang berbeda-beda di setiap Kalurahan, hal ini berkaitan dengan potensi yang dimiliki Kalurahan tersebut serta kepentingan lainnya. Dana Desa Bersumber dari APBN adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (4).

Penelitian ini menyoroti penyaluran Dana Keistimewaan kepada Kalurahan yang jumlahnya berbeda sesuai potensi dan kesiapan program. Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY No. 37 Tahun 2021, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan bertujuan mempercepat kebijakan strategis Gubernur dalam urusan keistimewaan. Pagu definitif Dana Keistimewaan mencapai Rp1,42 triliun di tahun 2024, dengan Rp131,4 miliar untuk Kalurahan dalam bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Meskipun demikian, Kalurahan Salamrejo di Kapanewon Sentolo tidak termasuk penerima BKK. Dengan luas wilayah 421,3 ha dengan sawah dan pemukiman yang mendominasi, Salamrejo memiliki potensi ekonomi lokal seperti kerajinan serat alam yang belum dikelola secara maksimal. Pengembangan potensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. Progres Dana Keistimewaan Program Tahun Anggaran 2024 Kalurahan Salamrejo

No.	Program	Pagu	Target	Realisasi
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	175.000.000	175.000.000 (100%)	33.449.600 (19,11%)
Deviasi 80,89 %				

Sumber: Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024 Paniradya Kaistimewan

Tabel 1. menyajikan data realisasi program yang dibiayai oleh Dana Keistimewaan di Kalurahan Salamrejo Tahun 2024. Program tersebut berjalan dengan capaian cukup baik dari segi fisik, yaitu mencapai 100% dan sesuai dengan target yang diinginkan. Akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan capaian dari sisi keuangan yang dilaporkan yaitu hanya tercapai 19,11% dari pagu yang seharusnya tercapai atau sebesar Rp33.449.600 dengan deviasi yang cukup tinggi yaitu sebesar 80,89%.

Sesuai dengan Undang-Undang Desa No.06 Tahun 2014 bahwa kepala desa harus bisa menampung aspirasi yang disampaikan masyarakat serta mampu menggerakan warganya dalam melaksakan proses pembangunan (5). Sesuai dengan hal tersebut maka sangat diperlukan komunikasi politik yang baik antara pemerintah Kalurahan dengan warga yang kemudian berlanjut antar pemerintah Kalurahan dengan pemerintah yang lebih tinggi terkait penyaluran Dana Keistimewaan kepada Kalurahan-kalurahan di DIY. Kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah dalam hal Dana Keistimewaan juga menyoroti pentingnya komunikasi dan keterbukaan antara kedua belah pihak (6). Sama hal nya dengan pengelolaan Dana Keistimewaan, model kebijakan pengelolaan Dana Desa harus diawali dengan upaya penguatan kewenangan dan harmonisasi hubungan antarlembaga pengelola dana desa di tingkat pusat (7).

Paniradya Kaistimewan yang berperan sebagai koordinator pelaksana urusan keistimewaan perlu melakukan kajian bersama tim koordinator pelaksanaan Dana Keistimewaan untuk komunikasi yang lebih dalam dengan pemangku kepentingan di tingkat Kalurahan yang memiliki banyak potensi. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman pola komunikasi dalam hal ini komunikasi politik di tingkat lokal tentang bagaimana pola tersebut akan memengaruhi para pembuat kebijakan dalam hal ini Paniradya kaistimewan dengan melibatkan Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo kabupaten Kulon Progo. Selain itu juga bertujuan mencari temuan-temuan apa saja yang menjadi kendala terkait penyaluran Dana Keistimewaan ke Kalurahan Salamrejo.

Salah satu teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset atau *Asset Based Community Development* (ABCD). ABCD telah menjadi populer sebagai pendekatan transformatif dalam pembangunan masyarakat, yang menekankan pentingnya memanfaatkan kekuatan dan aset yang ada dalam suatu masyarakat (8). Pendekatan ABCD akan dipadukan dengan teori framing, yang mana dapat diinterpretasikan bahwa berita sejatinya mengandungi kerangka kerja framing dalam empat level, yaitu indentifikasi masalah, penyebab masalah, penilaian moral dan rekomendasi penanganan masalah (9). Pada penelitian ini, teori framing akan mengamati bagaimana cara aktor politik di Kalurahan Salamrejo menyampaikan dan

mengemas pesan-pesan yang disampaikan kepada Paniradya Kaistimewan dan aktor politik lainnya terkait Kalurahan Salamrejo dengan dibingkai menjadi isu-isu tertentu yang dapat memengaruhi penyusun kebijakan.

Penelitian ini juga mengkaji sudut pandang tertentu terkait pesan-pesan yang dibingkai tersebut, seperti bagaimana framing visual nya, pemilihan kata, dan penggunaan perumpamaan untuk menyampaikan pesan politik penting lainnya. Kemudian akan ada evaluasi dari efek framing tersebut dimana dalam proses komunikasi politik tersebut akan timbul persepsi dan sikap-sikap yang akan saling memengaruhi saltu sama lain. Framing tersebut akan berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan di tingkat kalurahan. Kelemahan komunikasi publik di pemerintahan desa menyebabkan banyak sekali sekat-sekat yang sebetulnya tidak perlu ada (10). Selain itu, teori partisipasi politik juga dibahas dalam penelitian ini dimana keterlibatan masyarakat dalam politik merupakan salah satu indikator ketercapaian asas demokrasi (11). Penelitian akan fokus pada bagaimana Kalurahan Salamrejo terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan di tingkat yang lebih tinggi dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi dan prosesnya menyerap anggaran dari Dana Keistimewaan yang sudah disalurkan. Selanjutnya menganalisis tingkat partisipasi politik tersebut dilihat kondisi yang ada sebelumnya. Ini melibatkan penelusuran korelasi antara tingkat partisipasi politik dan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, berfokus pada analisis dinamika komunikasi politik antara Kalurahan Salamrejo dan Pemda DIY dalam implementasi kebijakan keistimewaan. Penelitian ini didukung dengan pendekatan ABCD sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang akan berkembang jika komunikasi politik yang dibangun berjalan dengan baik. Sumber utama dari penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan aktor utama pelaku komunikasi politik di Kalurahan Salamrejo yaitu Lurah Salamrejo. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari berbagai dokumen resmi seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Peraturan Gubernur DIY terkait Dana Keistimewaan, laporan pelaksanaan Danais, publikasi ilmiah, jurnal, dan artikel yang relevan. Dokumen-dokumen tersebut akan dianalisis untuk mengkaji bagaimana dinamika komunikasi politik yang terjadi dibingkai.

Analisis data selanjutnya dengan analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola dan narasi dalam dokumen-dokumen kebijakan dan laporan pelaksanaan program Dana Keistimewaan. Analisis tematik digunakan untuk menganalisis pola komunikasi, hambatan dan koordinasi antarinstansi. Kalurahan Salamrejo dipilih sebagai lokasi penelitian dengan alasan karena memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang unik. Salamrejo dengan masyarakatnya dikenal dengan tingkat kepedulian yang tinggi untuk isu-isu yang berkembang, hal itu terlihat dari banyaknya forum musyawarah dan kegiatan gotong royong yang sering dilaksanakan. Salamrejo menjadi lokasi yang ideal untuk mempelajari dinamika komunikasi politik di tingkat Kalurahan dengan masyarakat yang juga berperan sebagai aktor dalam proses tersebut. Dengan

demikian, penelitian ini diharapkan bisa berperan dalam memberikan kontribusi tentang dinamika komunikasi politik di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan wawancara dengan Lurah Kalurahan Salamrejo dan menelaah dokumen pelaporan dan kegiatan, didapat beberapa temuan yang menggambarkan dinamika komunikasi politik dan distribusi sumber daya di tingkat desa. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Kalurahan Salamrejo saat ini cukup beragam. Warga Kalurahan Salamrejo sebagian besar bekerja sebagai petani, akan tetapi ada masa dimana saat jeda masa proses pertanian seperti jeda saat pengolahan lahan, tanam hingga pasca panen digunakan para petani untuk menjalani usaha sampingan. Salah satu profesi sampingan para petani adalah menjadi pengrajin dengan mengolah bahan serat alam. Tidak hanya industri rumahan dengan skala Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tetapi di Kalurahan Salamrejo juga sudah berdiri pabrik yang bergelut di bidang tekstil. Dengan tingkat pendidikan warga yang rata-rata sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah atas (SMA), warga Kalurahan Salamrejo masih memiliki potensi untuk terus berkembang. Ekonomi lokal merupakan kemampuan ekonomi daerah yang mampu dan patut untuk dikembangkan serta menjadi sumber mata pencaharian masyarakat sekitar dan dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian lokal (12).

Proses komunikasi politik antar tingkat pemerintahan berjalan baik dengan Lurah Salamrejo yang aktif berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi. Bahkan komunikasi juga dilakukan tidak hanya kepada eksekutif yang lebih tinggi, tetapi juga kepada legislatif di tingkat Kabupaten dan Provinsi. Sehingga Kalurahan Salamrejo juga mendapat aliran dana yang bersumber dari dana aspirasi DPRD yang memang tujuannya untuk mendukung pembangunan daerah. Jika ditelaah lebih lanjut, pola komunikasi yang dibangun dilakukan dengan cara membangun jejaring yang baik, seperti aktif dalam perkumpulan Lurah, aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah dan juga kritis terhadap dinamika pengaplikasian regulasi yang terjadi di tingkat kalurahan.

Hasil dari komunikasi politik yang dilakukan tersebut menghasilkan aliran dana diluar Dana Desa yang dialokasikan untuk pelatihan manajemen bisnis pelaku usaha, perbaikan jalan dan inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayana publik yang di dukung oleh dana tersebut dilakukan untuk pendataan tanah warga sehingga menjadi tertib administrasi. Dari proses tersebut kemudian muncul salah satu faktor penghambat pelaksanaan kebijakan di Kalurahan Salamrejo adalah keterbatasan sumber daya manusia. Hal ini diungkapkan oleh Lurah Salamrejo yang menyatakan bahwa, “pamong kami masih terbatas dalam sumber daya khususnya pendidikan, perangkat Kalurahan yang sudah sarjana hanya 1 orang sehingga pelaporan kerap tertunda” (13). Kondisi ini menunjukkan bahwa kendala bukan hanya pada ketersediaan dana, tetapi juga pada kapasitas internal untuk mengelola proses administratif secara efektif. Kalurahan Salamrejo dan potensi di dalamnya pada dasarnya sudah siap untuk menjadi desa mandiri tetapi satu paket dengan kendala yang juga muncul dari internal Kalurahan sendiri. Faktor pendukung yang paling utama dalam pengembangan SDM adalah peningkatan kualitas pendidikan karena pendidikan merupakan bentuk investasi paling besar dalam SDM (14).

Pembahasan

Dari temuan tersebut menunjukkan ketidakseimbangan antara pelaksanaan program secara fisik dan serapan administratif anggaran. Apabila dilihat dari sisi substantif, maka program telah selesai dilaksanakan sesuai rencana, namun proses penyaluran dan penggunaan dari sisi keuangan belum berjalan maksimal. Perbedaan prioritas antar lembaga, kurangnya koordinasi, dan fragmentasi birokrasi menjadi tantangan utama dalam kolaborasi antar instansi pemerintah (15). Strategi komunikasi yang baik, termasuk penyampaian informasi yang jelas dan konsisten, mendukung keberhasilan implementasi program (16).

Pada temuan keterbatasan SDM karena tingkat pendidikan pada pamong Kalurahan, maka keterbatasan dalam komunikasi kebijakan, seperti kurangnya pelatihan dan perubahan informasi yang tidak konsisten, dapat menghambat implementasi sistem keuangan digital di instansi pemerintah (17). Selain itu Kalurahan Salamrejo yang belum memiliki kabel optik sehingga jangkauan internet yang belum memadai juga berpengaruh terhadap jalannya sistem pemerintahan yang serba cepat dan digital.

Penelitian ini menemukan pola komunikasi yang dilakukan oleh Lurah Salamrejo adalah komunikasi partisipatif dimana tidak hanya bergantung pada pola yang sudah terbentuk secara vertikal tetapi juga ditentukan oleh keterlibatan aktor lokal. Lurah Salamrejo sebagai aktor politik lokal menjalankan pola dengan membangun jejaring dengan para pemangku kebijakan di tingkat yang lebih tinggi. Lurah Salamrejo berhasil memaksimalkan komunikasi antar lembaga untuk mendapatkan dukungan pendanaan yang akan mendukung pembangunan baik dari eksekutif yang lebih tinggi maupun dari legislatif. Kondisi yang terjadi di Kalurahan Salamrejo menunjukkan bahwa membangun pola komunikasi yang baik merupakan instrumen penting dalam distribusi sumber daya di tingkat lokal.

Saat komunikasi eksternal yang dijalankan sudah cukup baik, kapasitas internal Kalurahan belum sepenuhnya bisa mengimbangi jalannya proses pembangunan. Aparatur kalurahan dalam hal ini Pamong Kalurahan belum memiliki kemampuan optimal dalam mengolah dan menjalankan tertib administrasi dikarenakan keterbatasan SDM. Ketimpangan tersebut sesuai dengan teori sumber daya yang menekankan jika keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan internal dalam mengelola sumber daya yang dimiliki (18).

Selain itu, potensi yang dimiliki Kalurahan Salamrejo seperti industri tekstil dan UMKM berbasis serat alam, menunjukkan adanya kekuatan sumber daya yang dapat dikembangkan dengan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD). Pendekatan ini menekankan pada identifikasi dan memanfaatkan aset lokal sebagai modal utama dalam pembangunan. Jika kapasitas SDM diperkuat dan didukung dengan potensi ekonomi berbasis aset lokal, Kalurahan Salamrejo akan mempunyai peluang besar untuk mempercepat transformasi menuju desa mandiri yang berdaya saing.

. Dinamika komunikasi politik di Kalurahan Salamrejo terjadi dalam pola komunikasi vertikal dan horizontal yang cukup baik. Lurah sebagai aktor utama cukup aktif menjalin jejaring dengan berbagai pemangku kebijakan yang membawa dampak positif yang menunjang pembangunan. Akan tetapi pelaksanaan kebijakan masih terkendala oleh beberapa faktor internal dari Kalurahan Salamrejo sendiri terutama dalam hal keterbatasan SDM

aparatur Kalurahan. Ketidakseimbangan capaian fisik dan administratif menjadi perhatian khusus untuk proses pembangunan di masa yang akan datang. Kalurahan Salamrejo tentu berpeluang besar untuk menjadi sebuah Kalurahan yang memiliki daya saing.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini memberikan pandangan dari sisi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini mendukung pendekatan teori sumber daya bahwa kemampuan internal sebuah organisasi khususnya di bidang SDM adalah salah satu faktor yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan pola komunikasi yang dibentuk sudah cukup baik dan menjadi bahan masukan untuk memprioritaskan bahkan menyetarakan kapasitas aparatur Kalurahan khususnya di bidang administratif dan teknologi informasi. Hal ini menjadi perhatian yang sangat penting agar potensi lokal seperti kerajinan serat alam bisa dikelola secara berkelanjutan.

REFERENSI

1. Yudhatama I. Komunikasi Politik dan Partisipasi Warga dalam Arena Perencanaan dan Penganggaran Dana Keistimewaan DIY. *J Ilmu Komun* [Internet]. 1 September 2017 [dikutip 26 April 2024];15(3):205–14. Tersedia pada: <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/2172>
2. Widodo A, Ayu Permatasari D. Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi dalam Program Bekasi Smart City. 2020 [dikutip 26 April 2024];5(1). Tersedia pada: <https://ejurnal.unida.gontor.ac.id/index.php/ettisalhttp://dx>.
3. Indra D, Wahid U. Tinjauan Literatur: Digital Komunikasi Politik Anies Baswedan. *J Ilmu Komun* [Internet]. 2021 [dikutip 26 April 2024];5(2):228–39. Tersedia pada: <https://scholar.google.com/>.
4. Badan Pusat Statistik. Statistik Potensi Desa DI. Yogyakarta 2018. 2018;1–190. Tersedia pada: <http://www.bps.go.id>
5. Nandang, Wanta, Pranata RM. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mengembangkan UMKM Desa Karya Mulya. *J Manaj dan Bisnis Kreat* [Internet]. 17 Oktober 2022 [dikutip 26 April 2024];8(1):61–9. Tersedia pada: <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/2965>
6. Mufidta F, Urumsah D. Determinan kesenjangan ekspektasi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pengelolaan dana keistimewaan: Model konseptual. *Proceeding Natl Conf Account Financ* [Internet]. 25 Januari 2024 [dikutip 26 April 2024];6:231–40. Tersedia pada: <https://journal.uii.ac.id/NCAF/article/view/32819>
7. Madjid T, Waisitiono S, Supriatna T, Prabowo H. Model of effective and efficient village fund management policy in Indonesia. *Interdiscip Soc Stud*. 2025;3(4).
8. Barid M, Wajdi N, Sa'adillah R, Ekaningsih AF, Rizal HS, Fathurrohman A. Asset-Based Community Development: : Engagem J Pengabdi Kpd Masy [Internet]. 26 Mei 2024 [dikutip 7 Oktober 2025];8(1):308–25. Tersedia pada: <https://engagement.fkdp.or.id/index.php/engagement/article/view/1784>
9. Ichwan Butsi F, Studi Ilmu Komunikasi P, Tinggi Ilmu Komunikasi-Pembangunan Medan S. Mengenal Analisis Framing: Sejarah dan Metodologi. *J Ilm Ilmu Komun*

- Commun [Internet]. 30 Maret 2019 [dikutip 26 April 2024];1(2):52–8. Tersedia pada: <https://ejurnal.stikpmedan.ac.id/index.php/JIKQ/article/view/14>
10. Ahmad, Farid S, Tinggi S, Negeri AI, Natal M. Strategi Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik di Level Pemerintahan Desa. J Inov Penelit [Internet]. 25 Agustus 2020 [dikutip 26 April 2024];1(4):813–20. Tersedia pada: <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/153>
 11. Sastrawati N. Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman. Al-Risalah [Internet]. 24 Februari 2019 [dikutip 26 April 2024];19(2):187–97. Tersedia pada: <https://www.neliti.com/publications/349624/>
 12. Rismayani R, Widayanti BH, Fitra F, Ovanda LT, Firdaus M, Wahyuningsih S. Pendampingan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Lokal. J ABDI Media Pengabdi Kpd Masy. 2023;8(2):179–86.
 13. Pristiawan D. Komunikasi Politik Tingkat Lokal. Kulon Progo: Wawanacara Pribadi; 2025.
 14. Chornelia RM, Lestari AW, Yoei YS. Pengembangan Sumber Daya Manusia Desa Gadingkulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Reformasi. 2023;13(1):129–39.
 15. Arnika M, Rifdan R, Arief MM, Halid AA waris, Taufik A, Hasrini S. Collaboration Between Government Agencies: Challenges and Opportunities in Public Policy Implementation. J Ilm Ilmu Adm Publik [Internet]. 21 November 2024 [dikutip 12 Mei 2025];14(2):577–82. Tersedia pada: <http://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/67934>
 16. Ahdiyana M, Sukmawati AD. Policy communication in the implementation of the Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial program in the City of Yogyakarta. Informasi [Internet]. 31 Desember 2022 [dikutip 12 Mei 2025];52(1):141–68. Tersedia pada: <https://scholarhub.uny.ac.id/informasi/vol52/iss1/8>
 17. Meizahra A, Hanani R, Kismartini K. Komunikasi Kebijakan dalam Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Klaten. J Public Policy Manag Rev [Internet]. 30 Juni 2023 [dikutip 12 Mei 2025];12(3):311–30. Tersedia pada: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/39832>
 18. Barney JB, Ketchen DJ, Wright M. Resource-Based Theory and the Value Creation Framework. J Manage [Internet]. 2021;47(7):1936–55. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1177/01492063211021655>